

**ANALISIS KINERJA DAN KEMAMPUAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Oleh:
ANNISA DRESTY PRAJWALITA
B 300 217 283

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS KINERJA DAN KEMAMPUAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

ANNISA DRESTY PRAJWALITA
B 300 217 283

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Daryono Soebagyo, M.Ec

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS KINERJA DAN KEMAMPUAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**


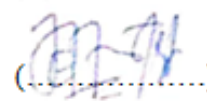
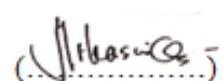
Oleh:

ANNISA DRESTY PRAJWALITA
B 300 217 283

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 21 Agustus 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Dr. Daryono Soebagyo, M.Ec
(Ketua Dewan Penguji)
2. Eni Setyowati , S.E. , M.Si
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Ir. Maulidyah IH MP.
(Anggota II Dewan Penguji)


(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. Anton Agus Setvawan, S.E., M.S.i
NIK/NIP. 82970217 1986 031 001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 21 Agustus 2021

Penulis,



Annisa Dresty Prajwalita

ANALISIS KINERJA DAN KEMAMPUAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah pemerintah Kota Surakarta tahun 2014-2019 diukur dengan tingkat derajat desentralisasi, tingkat ketergantungan daerah, tingkat kemandirian keuangan daerah, tingkat efektivitas pajak daerah, tingkat efisiensi pajak daerah, tingkat keserasian, tingkat efisiensi belanja dan tingkat pertumbuhan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data Ringkasan Laporan Realisasi APBD tahun 2014-2019. Data ini diperoleh melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah. Analisis Rasio Keuangan digunakan untuk menghitung Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kemampuan keuangan kota Surakarta tergolong tinggi dan posisi kota Surakarta berada pada kuadran I, yaitu kondisi paling ideal.

Kata kunci: kinerja, kemampuan, keuangan, *share* dan *growth*.

Abstract

This study aims to determine the local financial performance of the Surakarta City government in 2014-2019 measured by the degree of decentralization, the level of regional dependence, the level of regional financial independence, the level of effectiveness of local taxes, the level of local tax efficiency, the level of harmony, the level of spending efficiency and the growth rate. The type of data used in this research is secondary data. The secondary data in this study is the 2014-2019 APBD Realization Report Summary data. This data was obtained through the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) and from the website of the Director General of Fiscal Balance of the Regional Government. Financial Ratio Analysis is used to calculate the Regional Financial Performance Analysis and Regional Financial Capability. Based on the results of the study, it is known that the financial capacity of the city of Surakarta is high and the position of the city of Surakarta is in quadrant I, which is the most ideal condition.

Keywords: performance, ability, finance, share and growth.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah dituntut melaksanakan kinerjanya dengan baik dan transparan, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih baik, leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan

kepentingan, prioritas dan potensi daerah itu sendiri. Adanya otonomi daerah tersebut pemerintah diberi keluluasaan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah itu sendiri. Adanya otonomi daerah tersebut pemerintah diberi keluluasaan untuk mengelola sumber daya dan mempertanggung jawabkan kepada masyarakat sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah diperlukan adanya sistem desentralisasi secara transparan, efektif dan efisien dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat luas (Zuhri & Soleh, 2016).

Pertanggung jawaban pemerintah kepada publik yang bersih merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dimana untuk mewujudkannya memerlukan media tertentu. Salah satu alat untuk memfasilitasi tercapainya laporan keuangan pemerintah daerah yang kompetitif yaitu laporan keuangan pemerintah daerah tersebut digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan yang akurat dengan anggaran, menilai kondisi dan hasil operasional, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya serta membantu mengevaluasi tingkat efisien dan efektivitas.

Pengukuran kinerja untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja dapat menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas, *debt service coverage ratio* dan rasio pertumbuhan (Halim, 2012). Jadi analisa kinerja keuangan ini sangat penting karena dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang, menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, memonitor dan mengevaluasi kinerja, membantu menungkapkan dan memecahkan masalah yang ada. Terselenggaranya tata kelola pemerintah yang baik merupakan salah satu persyaratan bagi pemerintah dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.

Peran aktif dari pemerintah daerah dalam mengelola daerah sendiri, merupakan tantangan yang harus diterima oleh pemerintah agar dapat membangun dan mengelola daerah masing-masing dengan baik. Sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelimpahan wewenang pembangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan, dalam hal ini Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya pemberian wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus segala kepentingan daerah masing-masing, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dari Perangkat Daerah tersebut. Dengan demikian perlu dilakukan pengukuran kinerja terhadap pemerintah daerah tersebut.

Reformasi pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan adanya tuntutan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Guna mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik. Reformasi manajemen sektor publik harus dan sangat ditentukan oleh reformasi di bidang pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2012). Pemerintah daerah yang menjadi pihak yang menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat wajib untuk menyerahkan atau melaporkan pertanggungjawaban daerahnya untuk dilihat dan dinilai apakah pemerintah daerah telah mengelola keuangan daerah dengan baik atau tidak baik. Salah satu alat yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan suatu daerah adalah dengan analisis rasio.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Adanya otonomi daerah tersebut mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem pemerintahan pada Kota Surakarta, karena itu Pemerintah Kota Surakarta sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai kinerja pemerintah Kota Surakarta berhasil menjalankan tugasnya dengan baik.

Indeks daya saing investasi daerah kota memiliki nilai yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan daerah kabupaten, akibat adanya fenomena aglomerasi atau klustering daya saing investasi berdasarkan kecenderungan daerah perkotaan atau dekat dengan kota lebih baik daya saingnya dibandingkan daerah kabupaten yang jaraknya jauh dari daerah kota (Soebagyo, 2013). Berbagai ukuran daya saing regional dan kota diciptakan, salah satu di antaranya melalui pemeringkatan daerah, untuk memberikan deskripsi mengenai kinerja daya saing regional dan kota. Bagaimanapun fokus daya saing tidak hanya terbatas sebagai fenomena makro ekonomi, melainkan juga mempunyai kepentingan utamanya pada skala regional, kota, dan lokal. Berdasarkan hal itu, maka ada kecenderungan bahwa daerah perkotaan memiliki tingkat keuangan yang lebih baik.

Pemerintah Kota Surakarta merupakan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas dalam memberikan pelayanan barang dan jasa kepada masyarakat Kota Surakarta. Sebagai pelayan masyarakat, Pemerintah Kota Surakarta dituntut untuk memiliki manajemen yang baik dan profesional. Hal ini tercermin dalam laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kegiatan manajemen. Laporan keuangan dibuat secara periodik untuk mengetahui posisi keuangan dan kinerja serta hasil-hasil yang dicapai. Dalam melakukan tugasnya pemerintah Kota Surakarta masih menemukan banyak kendala seperti kebijakan yang belum tealisasi dengan baik, kurangnya kesadaran masyarakat pada pajak yang memberikan dampak pada kinerja Pemerintah Kota Surakarta. Berdasarkan

uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta”**.

2. METODE

2.1. Alat dan Model Penelitian

Penelitian ini akan mengamati tentang kinerja keuangan pemerintah Kota Surakarta tahun 2014-2019. Analisis Rasio Keuangan digunakan untuk menghitung Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah.

1) Analisis Kinerja Keuangan

Analisis Kinerja Keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu:

a) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal (Halim, 2012). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100\%$$

b) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingkat ketergantungan daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara dana perimbangan terhadap pendapatan daerah dengan formulasi sebagai berikut.

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

c) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Semakin tinggi kontribusi PAD, semakin tinggi juga kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

$$\text{Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

d) Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2012). Semakin tinggi besarnya nilai Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

2) Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

a. Perhitungan dan Analisis Share dan Growth

Diawali dengan perhitungan dan Analisis Kinerja PAD melalui ukuran Share dan Growth kemudian mengklasifikasikan dengan Pemetaan Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan Metode Kuadran.

$$\text{Share} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Growth} = \frac{\text{PAD}_i}{\text{PAD}_{i-1}} \times 100\%$$

b. Menghitung Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)

Menghitung Indeks Kemampuan Keuangan kemudian mengklasifikasikan dengan metode Indeks Kemampuan Keuangan. Metode Indeks Kemampuan Keuangan merupakan rata-rata hitung dari

Indeks Pertumbuhan (Growth), Indeks Elastisitas dan Indeks Share. Untuk menyusun indeks ketiga komponen tersebut, ditetapkan nilai maksimum dan minimum dari masing-masing komponen. Menyusun indeks untuk setiap komponen IKK dilakukan dengan menggunakan persamaan umum:

$$Index X = \frac{\text{Nilai x hasil pengukuran} - \text{Nilai x minimum}}{\text{Nilai x maksimum} - \text{Nilai x minimum}} \times 100\%$$

Berdasarkan persamaan di atas, maka persamaan IKK dapat ditulis sebagai berikut:

$$IKK = \frac{XG + XE + XS}{3}$$

Keterangan:

XG = Indeks Pertumbuhan (PAD)

XE = Indeks Elastisitas (Belanja Langsung terhadap PAD)

XS = Indeks Share (PAD terhadap APBD)

2.2. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2009). Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data Ringkasan Laporan Realisasi APBD tahun 2014-2019. Data ini diperoleh melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta

Objek penelitian ini adalah kinerja keuangan daerah pemerintah kota Surakarta tahun anggaran 2014-2019. Adapun hasil pengolahan dari data rasio kemandirian keuangan daerah, rasio tingkat kemandirian daerah, tingkat ketergantungan daerah, tingkat desentralisasi fiskal dan tingkat efektivitas PAD adalah sebagai berikut:

1) Rasio kemandirian keuangan daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan. Rasio Kemandirian dihitung dengan cara perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Bantuan Pemerintah Pusat atau Propinsi dan Pinjaman. Hasil perhitungan tingkat kemandirian keuangan daerah kota Surakarta dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Rasio Kemandirian Keuangan Kota Surakarta

No	Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Rasio Kemandirian
1	2014	335,660,206,641	797,295,017,689	42.10%
2	2015	372,798,426,790	755,728,419,465	49.33%
3	2016	425,502,779,064	1,103,859,741,264	38.55%
4	2017	527,538,846,222	1,048,161,106,387	50.33%
5	2018	525,125,554,686	1,090,922,293,666	48.14%
6	2019	545,791,815,386	1,097,432,664,182	49.73%
Rata-Rata				46.36%

Sumber: data sekunder yang diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio kemandirian kota Surakarta mengalami perkembangan fluktuatif dari tahun ke tahun. Rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah kota Surakarta tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 46,36%. Ini berarti bahwa kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan terhadap APBD masih kecil dibandingkan peran dari pemerintah pusat/provinsi yang masih sangat besar dalam APBD yang dapat dilihat dari besarnya penerimaan yang berasal dari transfer pemerintah pusat/provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah kota Surakarta pada pemerintah pusat/provinsi masih sangat besar, pemerintah daerah belum mampu mencukupi kebutuhan daerahnya sendiri.

2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Kemajuan suatu daerah bisa terlihat dari aktifitas pembangunan baik dari infrastruktur, sarana dan prasaran yang di butuhkan untuk menunjang suatu kegiatan pemerintah dengan mengoptimalisasi pendapatan asli daerah

tersebut yang terlihat dari rasio dana perimbangan terhadap pendapatan daerah. Hasil perhitungan tingkat ketergantungan keuangan daerah kota Surakarta tahun anggaran 2014-2019 dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan Kota Surakarta

No	Tahun	Dana Perimbangan	Pendapatan Daerah	Rasio Ketergantungan
1	2014	797,295,017,689	1,525,575,850,953	52.26%
2	2015	755,728,419,465	1,568,482,686,616	48.18%
3	2016	1,103,859,741,264	1,703,003,847,995	64.82%
4	2017	1,048,161,106,387	1,803,915,423,159	58.10%
5	2018	1,090,922,293,666	1,879,056,016,679	58.06%
6	2019	1,097,432,664,182	1,915,593,826,193	57.29%
Rata-Rata				56.45%

Sumber: data sekunder yang diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan kota Surakarta mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Rata-rata tingkat ketergantungan daerah kota Surakarta tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 56,45%, sehingga diklasifikasikan dalam kategori tingkat ketergantungan keuangan yang sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan tingkat ketergantungan Kota Surakarata masih tinggi terhadap pemerintah pusat melalui dana perimbangan.

3) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna membiayai pembangunan. Derajat Desentralisasi Fiskal, diukur dengan cara PAD dibandingkan dengan Pendapatan Daerah. Keberhasilan pelaksanaan Tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan suatu pembangunan dapat kita lihat dari rasio PAD terhadap pendapatan daerah. Hasil perhitungan tingkat desentralisasi fiskal kota Surakarta tahun anggaran 2014-2019 dapat dilihat di tabel 3.

Tabel 3. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Surakarta

No	Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	Derajat Des. Fiskal
1	2014	335,660,206,641	1,525,575,850,953	22.00%
2	2015	372,798,426,790	1,568,482,686,616	23.77%
3	2016	425,502,779,064	1,703,003,847,995	24.99%
4	2017	527,538,846,222	1,803,915,423,159	29.24%
5	2018	525,125,554,686	1,879,056,016,679	27.95%
6	2019	545,791,815,386	1,915,593,826,193	28.49%
Rata-Rata				26.07%

Sumber: data sekunder yang diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal kota Surakarta cenderung mengalami kenaikan, namun sedikit mengalami penurunan pada tahun 2018. Rata-rata tingkat derajat desentralisasi fiskal kota Surakarta tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 26,07% sehingga pemerintah kota Surakarta termasuk dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah semakin baik yang mana kontribusi PAD dalam menopang pendapatan daerah, serta peran PAD atau kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunannya sendiri kurang dari 50%.

4) Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Tingkat efektifitas suatu daerah terlihat dari pencapaian tujuan realisasi pendapatan dan target-target yang dicapai dalam suatu periode pemerintahan daerah yang diukur melalui rasio pendapatan daerah terhadap target pendapatan daerah. Hasil perhitungan tingkat efektifitas keuangan daerah kota Surakarta tahun anggaran 2014-2019 dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Rasio Tingkat Efektivitas Keuangan Kota Surakarta

No	Tahun	Realisasi PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio Efektivitas
1	2014	335,660,206,641	318,814,097,000	105.28%
2	2015	372,798,426,790	361,019,672,000	103.26%
3	2016	425,502,779,064	394,200,858,000	107.94%
4	2017	527,538,846,222	492,503,909,101	107.11%
5	2018	525,125,554,686	505,328,290,741	103.92%
6	2019	545,791,815,386	567,757,960,983	96.13%
Rata-Rata				103.94%

Sumber: data sekunder yang diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio efektivitas kota Surakarta mengalami fluktuasi cenderung mengalami penurunan di akhir tahun 2019. Rata-rata tingkat efektifitas kota Surakarta tahun anggaran 2014 sampai dengan 2019 sebesar 103,94% yang berarti termasuk dalam kategori sangat efektif. Hal ini menggambarkan tingkat kemampuan daerah semakin baik.

5) Pemetaan Keuangan dengan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dan Metode Kuadran

Kemampuan keuangan dengan indeks kemampuan keuangan daerah diukur dengan menghitung rata-rata dari *indeks share*, *growth* dan *elastisitas*, dengan demikian akan terlihat bagaimana peta keuangan kota Surakarta. Setelah mengetahui bagaimana kondisi kemampuan keuangan daerah kota Surakarta maka kita dapat mengetahui pada kuadran mana kondisi keuangan kota Surakarta. Adapun hasil pengolahan dari indeks *share*, *growth*, dan elastisitas adalah sebagai berikut:

a) *Growth*

Growth adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya dalam memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) dari periode ke periode. Hasil pengukuran indeks *growth* dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Indeks *Growth*

No	Tahun	Realisasi PAD	Kondisi Maksimal	Kondisi Minimal	Indeks
1	2014	335,660,206,641	545,791,815,386	335,660,206,641	-
2	2015	372,798,426,790	545,791,815,386	335,660,206,641	0.177
3	2016	425,502,779,064	545,791,815,386	335,660,206,641	0.428
4	2017	527,538,846,222	545,791,815,386	335,660,206,641	0.913
5	2018	525,125,554,686	545,791,815,386	335,660,206,641	0.902
6	2019	545,791,815,386	545,791,815,386	335,660,206,641	1.000
JUMLAH					3.419
(Rata-Rata) X_G					0.569

Sumber: data sekunder yang diolah

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.5 indeks *growth* Kota Surakarta pada tahun 2014-2019 memiliki nilai rata-rata *growth* (X_G) sebesar 0,569.

b) *Share*

Share adalah indikator ukuran untuk mengukur seberapa jauh kemampuan daerah untuk membiayai kegiatan rutin dan belanja pembangunan daerah.

Tabel 6. Indeks *Share*

No	Tahun	Nilai Share	Kondisi Maksimum	Kondisi Minimum	Indeks
1	2014	0.226824	0.298323	0.226824	-
2	2015	0.243257	0.298323	0.226824	0.230
3	2016	0.253207	0.298323	0.226824	0.369
4	2017	0.298323	0.298323	0.226824	1.000
5	2018	0.274243	0.298323	0.226824	0.663
6	2019	0.274582	0.298323	0.226824	0.668
JUMLAH					2.930
Rata-Rata (X_S)					0.488

Sumber: data sekunder yang diolah

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 6 indeks *share* Kota Surakarta pada tahun 2014-2019 memiliki nilai rata-rata *share* (X_S) sebesar 0,488.

c) Indeks elastisitas

Elastisitas adalah ukuran yang menggambarkan sensitivitas atau elastisitas PAD terhadap perkembangan ekonomi. Nilai yang menunjukkan elastisitas pertumbuhan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Surakarta sebagai salah satu indikator keberhasilan pemerintah bisa dilihat dari hasil rata-rata indeks elastisitas. Adapun hasil perhitungan indeks elastisitas dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Indeks Elastisitas

No	Tahun	Elastisitas	Kondisi Maksimum	Kondisi Minimum	Indeks
1	2014	0.535942	0.591555	0.446432	0.617
2	2015	0.591555	0.591555	0.446432	1.000
3	2016	0.561539	0.591555	0.446432	0.793
4	2017	0.511744	0.591555	0.446432	0.450
5	2018	0.446432	0.591555	0.446432	-
6	2019	0.462805	0.591555	0.446432	0.113
JUMLAH					2.973
Rata-Rata (X_E)					0.496

Sumber: data sekunder yang diolah

Dengan hasil perhitungan pada tabel 7 menunjukkan rata-rata indeks elastisitas sebesar 0,496. Adapun dari hari hasil pengukuran indeks *Growth*, *Share* dan elastisitas maka di peroleh rata-rata indeks kemampuan keuangan daerah kota Surakarta. Hasil perhitungan indeks kemampuan keuangan daerah kota Surakarta tahun anggaran 2014-2019 dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Indeks Kemampuan Keuangan Kota Surakarta

Indeks Growth	Indeks Share	Indeks Elastisitas	IKK
0.569	0.488	0.496	0.518

Dilihat dari hasil perhitungan Indeks kemampuan keuangan kota Surakarta tahun anggaran 2014 sampai dengan 2019, skala indeks kemampuan keuangan daerah menunjukkan angka 0,518. Ini berarti kemampuan keuangan kota Surakarta tergolong tinggi. Peta Kemampuan Keuangan berdasarkan metode kuadran dengan kondisi masing-masing tercantum dalam tabel 9.

Tabel 9. Peta Kemampuan Keuangan Berdasarkan Metode Kuadran

Rata-rata Share (%)	Rata-rata <i>Growth</i> (%)	
	KUADRAN II	KUADRAN I
	<i>Share</i> : Rendah	<i>Share</i> : Tinggi
	<i>Growth</i> : Tinggi	<i>Growth</i> : Tinggi
	KUADRAN IV	KUADRAN III
	<i>Share</i> : Rendah	<i>Share</i> : Tinggi
	<i>Growth</i> : Rendah	<i>Growth</i> : Rendah

Sumber: Bapenas, 2003

Berdasarkan peta kemampuan keuangan daerah dengan metode kuadran maka dapat dikelompokkan status kemampuan keuangan dengan kriteria atau kondisi seperti pada tabel 10.

Dari hasil perhitungan *share* dan *growth* terhadap ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Surakarta tahun anggaran 2014 sampai dengan 2019, maka diperoleh data *share* sebesar 0.488 dan *growth* sebesar 0.569 kemudian dengan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode kuadran, posisi kota Surakarta berada pada kuadran I, yaitu kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalam

total belanja, dan daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya nilai *share* dan *growth* yang tinggi.

Tabel 10. Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan

KUADRAN	KONDISI
I	Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalam total belanja, dan daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya nilai <i>share</i> dan <i>growth</i> yang tinggi
II	Kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam Total Belanja. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja masih rendah namun pertumbuhan (<i>growth</i>) PAD tinggi.
III	Kondisi ini juga belum ideal. Peran PAD yang besar dalam Total Belanja mempunyai peluang yang kecil karena pertumbuhan PAD nya kecil. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah.
IV	Kondisi ini paling buruk. Peran PAD belum mengambil peran yang besar dalam Total Belanja, dan daerah belum mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja dan pertumbuhan PAD rendah

Sumber: Bapenas, 2003

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kinerja keuangan daerah Kota Surakarta tahun 2014-2019 menggunakan indeks dan peta kemampuan keuangan daerah maka dapat diketahui bahwa berdasarkan nilai indeks kemampuan keuangan daerah skala indeks menunjukkan angka 0.518. Ini berarti kemampuan keuangan kota Surakarta tergolong tinggi. Tingginya tingkat kemampuan keuangan pemerintah daerah kota Surakarta disebabkan oleh besarnya bantuan keuangan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan peta kemampuan keuangan daerah yang dihitung dari hasil perhitungan *share* dan *growth* terhadap ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Surakarta tahun 2014 sampai dengan 2019, maka diperoleh data *share* 0.488 dan *growth* sebesar 0.569. Kemudian dengan pemetaan

kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode kuadran, posisi kota Surakarta berada pada kuadran I, yaitu kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalam total belanja, dan daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya nilai share dan growth yang tinggi.

4.2. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian dengan berbagai keterbatasan yang ada, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kota Surakarta disarankan agar meningkatkan pengelolaan terhadap potensi yang ada, karena dengan seperti itu mampu membawa dampak yang besar, tidak hanya bagi pemerintah tetapi juga bagi masyarakat.
- 2) Pemanfaatan potensi di Kota Surakarta sangat beragam antara lain bidang pariwisata, kesehatan, budaya, perdagangan, dan Pendidikan. Apabila pemerintah berhasil memaksimalkan potensi tersebut dengan baik, maka pajak yang berperan utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah akan semakin meningkat. Dalam hal ini, pemerintah berperan dengan cara memberikan informasi yang rinci kepada masyarakat tentang kewajiban mereka sebagai pembayar pajak dan retribusi.
- 3) Pemerintah Kota Surakarta perlu melakukan pengawasan terhadap pihak yang terkait dengan pemungutan pajak dan retribusi supaya tidak terjadi kecurangan, karena besarnya pajak dan retribusi tidak hanya sebagai komponen utama untuk meningkatkan PAD, tetapi juga sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan masyarakat.
- 4) Bagi penelitian selanjutnya, dapat membandingkan evaluasi kinerja dan kemampuan keuangan dengan dua daerah yang memiliki karakteristik yang sama ataupun berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Halim, Abdul. 2016. *Problem Desentralisasi Dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah, Peluang Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah* . Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.

Mardiasmo. 2012. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Budi.

Mardiasmo. 2012. *Akuntansi Keuangan Dasar*. Yogyakarta: BPFÉ.

Soebagiyo, D; Triyono dan Cahyono, Y.T. 2013. Regional Competitiveness and Its Implications for Development. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 14, No. 2, p. 160-171.

Zuhri, M dan Soleh, A. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. *Ekombis Review*. Vol. 1, No. 1.